

Implementasi Kebijakan Aplikasi SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah) dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang

Syahrwati Syahfat *), **Supratiwi **)**

Email : syahrawatisyahfat383@gmail.com, tiwik75@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 74605407
Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah) merupakan sebuah program pelayanan lapor sampah yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Berdasarkan data, produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1.100-1.200 ton setiap harinya. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Semarang. Layanan SILAMPAH ini dapat digunakan untuk melaporkan sampah yang belum tertangani dan sampah liar yang ditemui di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan aplikasi SILAMPAH di Kota Semarang dan hambatan dalam proses implementasi aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2019, aplikasi SILAMPAH mengalami kendala sehingga tidak dapat digunakan lagi, untuk mengatasinya layanan SILAMPAH dialihkan ke media sosial Kota Semarang. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi dan layanan SILAMPAH. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan keterbatasan anggaran, belum adanya SOP yang lebih jelas juga mempengaruhi pelayanan SILAMPAH. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Kota Semarang meningkatkan komitmen dan pengawasan terhadap kebijakan atau program yang telah dibuat dan memberikan dukungan melalui penyediaan anggaran yang memadai, sedangkan DLH Kota Semarang khususnya pengelola SILAMPAH perlu melakukan kembali sosialisasi kepada masyarakat Kota Semarang dan menyusun SOP yang lebih jelas. Masyarakat juga dibutuhkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program pengelolaan sampah melalui SILAMPAH di Kota Semarang.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, SILAMPAH, Pengelolaan Sampah

***Policy Implementation of the SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah) application
in waste management in Semarang City***

Syahrawati Syahfat *), Supratiwi **)

Email : syahrawatisyahfat383@gmail.com

Department of Politics and Government

Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kode Pos 50275

Telepon/Faksimile (024) 74605407

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah) is a waste reporting service program created by the Semarang City Environmental Service. Based on data, waste production in Semarang City reaches 1,100-1,200 tons every day. This application was created to improve waste management and handling in Semarang City. This SILAMPAH service can be used to report untreated waste and illegal waste found in Semarang City. This research aims to explain the implementation of the SILAMPAH application policy in Semarang City and the obstacles in the application implementation process. This research uses the theory of policy implementation by George Edward III which explains that policy implementation consists of four indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection in this research was through observation, interviews, and documentation. The research results show that since 2019, the SILAMPAH application has experienced problems so that it can no longer be used, to overcome this, the SILAMPAH service was transferred to Semarang City's social media. Therefore, there are still many people who do not know about the SILAMPAH application and services. This is also influenced by a lack of outreach and budget limitations, the absence of clearer SOPs also affects SILAMPAH services. This research recommends that the Semarang City government increase commitment and supervision of the policies or programs that have been made and provide support through adequate budgets. At the same time, the Semarang City DLH, especially the SILAMPAH management, needs to carry out outreach again to the Semarang City community and prepare clearer SOPs. The community also needed to participate actively in supporting the waste management program through SILAMPAH in Semarang City.

Keywords: Policy Implementation, SILAMPAH, Waste Management

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kota Semarang merupakan kota penghasil sampah terbesar di Jawa Tengah. Timbulan sampah harian Kota Semarang pada tahun 2023 mencapai 1,182.29 ton/hari. Hal ini menunjukkan bahwa produksi sampah Kota Semarang sangat besar dan tidak dapat dihindari terdapat sampah yang belum tertangani dengan baik dan munculnya sampah liar di tempat-tempat tertentu.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi sampah di Kota Semarang adalah dengan mencanangkan berbagai kebijakan atau program yang dapat meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Semarang, salah satunya aplikasi SILAMPAH oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Aplikasi SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah) merupakan aplikasi pelaporan sampah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait sampah di Kota Semarang. Aplikasi ini dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. SILAMPAH dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan

masalah sampah dengan mengisi form yang telah tersedia di aplikasi SILAMPAH.

Pada proses implementasi aplikasi SILAMPAH kemudian terjadi kendala yang mengharuskan aplikasi SILAMPAH harus dinonaktifkan dan dialihkan ke media sosial DLH Kota Semarang. Adanya perubahan ini kemudian berdampak pada proses implementasi aplikasi SILAMPAH. Hal ini yang kemudian menarik peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Aplikasi SILAMPAH dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang.”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi kebijakan aplikasi SILAMPAH dalam mengatasi masalah sampah di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang melalui aplikasi SILAMPAH?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis implementasi kebijakan aplikasi SILAMPAH dalam

mengatasi masalah sampah di Kota Semarang.

2. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan aplikasi SILAMPAH.

D. KERANGKA TEORI

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan istilah yang sangat sering kita temukan, kebijakan publik merupakan kebijakan atau putusan yang dibuat untuk kepentingan publik.

Thomas R Dye dalam (Winarno, 2002:15) bahwa Kebijakan Publik itu didefinisikan sebagai berbagai pilihan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan Pemerintah (Publik) mencakup kumpulan keputusan yang diciptakan oleh suatu pemerintah dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan petunjuk yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan khususnya dalam bentuk dekrit atau peraturan pemerintah. (Amir Santoso dalam Djopari, 2016:15).

2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan penerapan suatu kebijakan publik. Implementasi ini merupakan sebuah strategi dimana sebuah kebijakan publik yang sudah dirumuskan, dikelola dengan dilaksanakan, sehingga implementasi kebijakan publik adalah upaya untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan publik. Nugroho (2014: 110).

Menurut George C. Edward III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Dalam mendukung Keberhasilan implementasi kebijakan, hal yang perlu diperhatikan adalah setiap pelaksana kebijakan (implementor) mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran harus disalurkan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga dapat meminimalkan adanya distorsi implementasi.

Pentingnya komunikasi meliputi aspek Transmisi yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait program atau kebijakan yang dibuat kepada publik yang biasanya dilakukan melalui

sosialisasi, aspek lainnya meliputi kejelasan informasi yang disampaikan, dan konsistensi dalam penyampaian informasi.

b. Sumber daya

Sumber daya sangat diperlukan bagi para pelaksana kebijakan dalam mendukung para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia (staff) maupun sumber daya pendukung lainnya seperti ketersediaan informasi, wewenang termasuk didalamnya sumber daya anggaran dan fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi adalah karakter atau kepribadian yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan (*Implementor*). Semakin beragam pelayanan yang diberikan atau semakin beragam perilaku yang diatur, hal ini juga akan berpengaruh semakin sulit upaya untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Disposisi meliputi pengangkatan birokrat dan insentif.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan bagian yang penting dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi dapat mempengaruhi suatu kebijakan dapat berjalan lebih efisien atau sebaliknya. Aspek ini mencakup *Standard Operating Procedure*

(SOP) dan Fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan atau program.

E. METODE PENELITIAN

Berdasarkan topik permasalahan yang diteliti, metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Nugroho (2014:105) menyimpulkan bahwa metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki ciri yang memakai fenomena alami dan bersifat deskriptif, menitikberatkan pada proses, menggunakan pendekatan induktif, dan memberikan perhatian terhadap makna. Metode ini untuk menjelaskan bagaimana implementasi aplikasi SILAMPAH dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang. Subjek Penelitian berdasarkan *purposive sampling* yaitu Teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu orang-orang yang berkaitan dengan topik. Oleh karena itu dalam penelitian ini, subjek penelitian SILAMPAH adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang, serta pelaksana dan pengguna layanan aplikasi SILAMPAH.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dengan para

narasumber, dan dokumentasi. Pada proses Analisis data menggunakan teknik pengumpulan seluruh data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan (kesimpulan). Selain itu, kualitas data menggunakan teknik triangulasi sumber data.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Aplikasi SILAMPAH

Implementasi kebijakan Aplikasi SILAMPAH berdasarkan teori George C. Edward III yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Aplikasi SILAMPAH diprakarsai oleh Bapak Muthohar selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Aplikasi ini diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 2018 dan dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang bertempat di Jalan Tapak Raya, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Pada kegiatan ini secara langsung dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang dan jajarannya, Perwakilan dari tokoh masyarakat, dan perwakilan Camat di Kota Semarang.

Setelah peluncuran resmi aplikasi SILAMPAH, Kepala Dinas Kota Semarang mulai melakukan

sosialisasi kepada masyarakat. Pada awal sosialisasi ini Kepala Dinas melakukan pengenalan aplikasi baik secara sosialisasi langsung maupun melalui media. Salah satu sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi dan pengenalan aplikasi SILAMPAH melalui stasiun TV. Setelah berjalannya aplikasi SILAMPAH untuk menunjukkan pentingnya aplikasi ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga ikut dalam sidak OTT dengan bekerja sama dengan PPNS Satpol PP untuk menindaklanjuti pelanggaran sampah secara langsung, kegiatan ini dilakukan di wilayah sekitar Simpang Lima Kota Semarang.

Pada awal peluncuran SILAMPAH, sosialisasi yang dilakukan sudah cukup optimal tetapi secara lingkup masih sangat terbatas. Pada masa awal SILAMPAH beroperasi, sosialisasi ini masih berfokus di sekitar pusat Kota Semarang. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat yang tidak mengetahui adanya aplikasi SILAMPAH.

Pada tahun 2019, Aplikasi SILAMPAH mengalami kendala dan tidak bisa digunakan lagi hingga saat ini. Kegiatan sosialisasi terkait

aplikasi ini kemudian semakin berkurang. Kegiatan sosialisasi ini tentunya akan mempengaruhi publikasi SILAMPAH dan jangkauannya kepada masyarakat yang merupakan target utama dalam aplikasi ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tetap berusaha agar bisa mengatasi masalah ini dan memberikan pelayanan melalui alternatif lain yakni dengan menggunakan media sosial. Laporan yang sebelumnya di submit melalui aplikasi SILAMPAH kemudian dialihkan dan dapat dilaporkan melalui media sosial Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

b. Sumber Daya

Pada pelaksanaan aplikasi SILAMPAH, Sumber Daya Manusia yang dimiliki terdiri dari admin, koordinator lapangan, dan petugas lapangan termasuk didalamnya driver dan petugas kebersihan yang disebut dengan Pasukan Merah atau Pasukan Gerak Cepat. Sumber Daya untuk admin pada pelaksanaannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu admin utama yang berada di DLH Kota Semarang dan admin pada setiap UPTD di Kota Semarang.

Jumlah admin yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang saat ini terdiri dari lima

admin yang bertugas dalam mengelola laporan-laporan SILAMPAH, sedangkan untuk admin UPT yang tersebar di Kota Semarang saat ini terbagi menjadi empat UPT Wilayah, setiap UPT mencakup empat kecamatan. Jumlah admin UPT terdiri dari satu sampai dua orang penanggungjawab.

Anggaran terakhir yang didapatkan SILAMPAH berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2019, belanja jasa pengembangan Aplikasi Silampah sebesar Rp 90.000.000.00. Aplikasi Silampah berjalan aktif hanya 1 tahun periode. Oleh karena itu, setelah mengalami *down*, aplikasi Silampah tidak memiliki anggaran khusus lagi.

Jumlah armada yang dikelola DLH Kota Semarang totalnya adalah 103 armada yang terdiri dari 86 Amrol dan 17 Dump. Armada terbanyak berada di UPT Kebersihan Wilayah 1 yang mencakup Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, dan Kecamatan Gajahmungkur sebanyak 36 armada, sedangkan UPT 4 yang mencakup Kecamatan Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, dan Mijen dengan jumlah armada paling sedikit yaitu 18 armada.

c. Disposisi

Dalam implementasi program dibutuhkan sikap yang responsif dan tanggap oleh pemimpin sebagai pembuat kebijakan dan para implementator. Kesamaan sikap ini akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang ada. Tidak adanya tindak lanjut mengenai perbaikan sistem aplikasi SILAMPAH, kekurangan truk pengangkut sampah, terbatasnya anggaran bahkan tidak ada anggaran pasti merupakan beberapa contoh adanya kekurangan dalam aspek disposisi dalam pelaksanaan SILAMPAH.

Perekrutan pengelola SILAMPAH khususnya untuk admin membutuhkan beberapa keterampilan dasar. Berdasarkan wawancara dengan Hartana Subekti selaku Sekretaris DLH Kota Semarang, menjelaskan bahwa tidak ada kualifikasi khusus dalam perekrutan admin SILAMPAH. Kualifikasi terpenting adalah admin dapat mengoperasikan komputer dan mengelola laporan yang ada untuk segera ditindaklanjuti ke TPS dan petugas lapangan terkait.

Beberapa hal perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan atau program. Menurut Edward III, salah

satu aspek yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah adanya insentif. Penyediaan insentif akan memberikan peningkatan kinerja bagi pelaksana kebijakan. Akan tetapi pemberian insentif tentunya bergantung pada anggaran yang dimiliki untuk pelaksanaan pelayanan SILAMPAH ini.

Tidak ada tunjangan tambahan selain gaji pokok bagi para pegawai khususnya di wilayah kebersihan UPT baik ASN dan non ASN. Para pelaksana lapangan memenuhi kebutuhan sehari-hari menggunakan gaji pokok masing-masing. Idealnya untuk para staff diberikan tunjangan tambahan atau insentif yang dapat mendukung pekerjaan mereka, mengingat tugas yang cukup berat setiap harinya, hal ini dapat mendorong kinerja dan motivasi staf untuk melakukan tugasnya lebih maksimal.

d. Struktur Birokrasi

Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan SILAMPAH ini berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi, aplikasi SILAMPAH belum memiliki SOP yang lebih jelas, selama ini Admin dan pelaksana lapangan hanya menggunakan SOP lama yang tidak ada secara tertulis.

Hal ini menunjukkan masih

kurangnya kesiapan dalam menjalankan aplikasi SILAMPAH ini, belum adanya SOP yang tersedia secara resmi membuat pelayanan ini lebih fleksibel tetapi di sisi lain dapat menyebabkan terjadinya kelalaian dalam pelayanan. Tidak adanya SOP ini membuat para pelaksana SILAMPAH melakukan tugasnya sesuai dengan mereka sendiri, ini juga akan mempengaruhi kedisiplinan pelaksana.

Koordinasi antara pelaksana SILAMPAH dilakukan melalui grup chat WhatsApp, koordinasi ini dilakukan secara intensif. Hal ini kemudian meningkatkan kinerja dan efektifitas pelaksanaan layanan SILAMPAH. Adanya grup chat tersebut juga memberikan kemudahan sehingga para anggota pelaksana mengetahui laporan sampah yang tengah ditangani. Adapun kekurangannya menimbulkan adanya informasi yang terlewat apabila ada beberapa informasi yang masuk secara bersamaan.

Selain kerja sama secara internal, DLH Kota Semarang khususnya SILAMPAH juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang dan layanan SAPA MBAK ITA. Sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan laporan

sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang kini membuat pemantaun mandiri.

Hal ini dapat mempersingkat penanganan laporan, dengan sistem pemantauan khusus maka SILAMPAH dapat langsung memonitoring sampah di Kota Semarang tanpa harus menunggu tindak lanjut dari dishub.

2. Hambatan dalam implementasi Kebijakan aplikasi SILAMPAH

a. Faktor Komunikasi

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengakibatkan aplikasi ini hanya diketahui segelintir orang saja. Hal ini diperparah karena aplikasi yang tidak bisa lagi digunakan sejak tahun 2019 dan dialihkan ke media lain yakni media sosial Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Oleh karena itu, masyarakat lebih sering melaporkan sampah melalui media sosial Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Faktanya banyak yang sudah menggunakan pelayanan aplikasi SILAMPAH tapi tidak menyadarinya.

b. Faktor Sumber daya

Dalam pengoperasian aplikasi SILAMPAH, faktor sumber daya yang sangat mempengaruhi adalah sumber daya berupa anggaran. Sebuah

aplikasi dengan teknologi masa kini tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Aplikasi SILAMPAH telah mengalami kekurangan anggaran sejak tahun 2019, aplikasi yang mengalami *down* memerlukan perbaikan untuk mengaktifkan kembali aplikasi tersebut, namun karena terbatasnya anggaran, hingga kini aplikasi SILAMPAH masih belum bisa digunakan kembali dan masih melalui media alternatif yakni media sosial Dinas Lingkungan Kota Semarang dan SAPA MBAK ITA. Keterbatasan anggaran untuk aplikasi SILAMPAH juga berdampak pada terbatasnya fasilitas pengangkut sampah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja penanganan laporan khususnya apabila dalam keadaan tertentu ketika laporan yang masuk bersamaan dengan jadwal pengangkutan sampah ke TPA.

c. Faktor Disposisi

Terkait sikap birokrat dan pelaksana kebijakan, dalam implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila setiap pemimpin memiliki pemahaman dan sudut pandang yang sama terhadap suatu kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan pengawasan pemerintah terhadap keberlangsungan program yang telah

dibuat. Adapun perbedaan prioritas antara pemimpin dan implementor juga akan mempengaruhi proses berjalannya implementasi kebijakan dan hasil implementasi kebijakan. SILAMPAH merupakan program aplikasi yang dibuat pada tahun 2018 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang menjabat pada saat itu. Seiring berjalannya waktu terjadi pergantian kepemimpinan, setiap pemimpin baru tentunya memiliki visi misinya masing-masing. Hal ini tentu akan mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat. Beberapa program atau kebijakan akan mengalami pergeseran prioritas.

Di sisi lain Para petugas yang bertanggungjawab dalam penanganan lapangan tentunya memiliki kegiatan yang lebih berat, khususnya para petugas kebersihan dan pengangkut armada. Kegiatan fisik yang dilakukan setiap harinya tentu membutuhkan tenaga yang cukup, sehingga dibutuhkan fasilitas yang memadai termasuk konsumsi para petugas. Akan tetapi karena adanya keterbatasan anggaran, hal ini tidak memungkinkan adanya insentif berupa tunjangan tambahan untuk para pelaksana.

d. Faktor Struktur Birokrasi

SILAMPAH belum memiliki SOP tertulis, selama ini hanya dilakukan berdasarkan arahan dari kepala atau koordinator admin. Meskipun belum ada kesalahan fatal yang dialami, tetapi SOP masih tetap diperlukan. Belum adanya SOP tertulis ini merupakan bukti kurangnya kesiapan dalam pelaksanaan program SILAMPAH dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya SOP.

Adapun hambatan eksternal lainnya adalah adanya masalah data laporan yang tidak lengkap atau tidak jelas dan kendala koordinasi dan perizinan dengan masyarakat pemilik lahan.

G. KESIMPULAN

1) Implementasi Kebijakan Aplikasi SILAMPAH di Kota Semarang

a. Komunikasi. Pada aspek ini, Sosialisasi masih berfokus di sekitar pusat Kota Semarang. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan masih sangat terbatas sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya aplikasi SILAMPAH. Pada tahun 2019, aplikasi SILAMPAH mengalami kendala dan tidak

bisa dioperasikan lagi, sejak saat itu sosialisasi yang dilakukan juga semakin berkurang. Saat ini karena anggaran untuk aplikasi tersebut juga terhenti, tidak ada lagi sosialisasi yang dilakukan secara khusus untuk SILAMPAH. Oleh karena itu aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan aplikasi SILAMPAH masih belum optimal.

b. Sumber daya. Pada aspek Sumber Daya berupa staf, pelaksana aplikasi SILAMPAH sudah mencukupi yang terdiri dari admin, koordinator lapangan dan petugas lapangan. Sedangkan untuk sumber daya anggaran masih sangat terbatas, anggaran SILAMPAH terakhir diberikan pada tahun 2019. Setelah aplikasi tersebut dinonaktifkan, tidak ada lagi anggaran khusus untuk SILAMPAH. Keterbatasan anggaran ini kemudian mempengaruhi sumber daya fasilitas SILAMPAH.

c. Disposisi. Pada aspek ini dalam hal kualifikasi dalam perekrutan pengelola SILAMPAH khususnya untuk admin dibutuhkan kemampuan

mengoperasikan komputer, membaca data dan mendistribusikannya ke UPTD terkait, sedangkan dalam pengadaan insentif untuk pengelola SILAMPAH untuk saat ini belum ada, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran.

- d. Struktur birokrasi. Standard Operating Procedures (SOP) untuk aplikasi Silampah saat ini belum tersedia, khususnya setelah adanya peralihan ke media sosial DLH Kota Semarang tetapi laporan sampah dapat langsung dilaporkan ke media sosial DLH Kota Semarang dan akan ditanggapi maksimal 2x24 jam. Koordinasi yang dilakukan antar pengelola SILAMPAH melalui grup WhatsApp. Koordinasi ini dilakukan secara intensif setiap hari, setiap laporan atau aduan yang masuk akan dikoordinasikan antara pihak Command Center dengan pihak UPTD terkait di grup tersebut.

2) **Faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi aplikasi SILAMPAH.**

Hambatan dalam implementasinya berasal dari berbagai faktor, hal ini meliputi kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, disposisi yang kurang, dan ketersediaan SOP yang belum terpenuhi. Adapun hambatan lainnya adalah data laporan yang tidak lengkap dan tidak jelas serta kadangkali ditemui masalah koordinasi dan perizinan dengan masyarakat.

H. SARAN

1. Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat memperhatikan keberjalanan program yang telah dibuat. Dibutuhkan komitmen dan pengawasan dalam implementasi setiap program sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Pemerintah Kota Semarang juga perlu mendukung dalam hal anggaran yang memadai sehingga program yang telah dibuat dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang lebih baik dan lebih maksimal.
2. Pihak Pengelola SILAMPAH perlu lebih aktif dalam peningkatan

kinerja pelayanan SILAMPAH termasuk didalamnya sosialisasi melalui berbagai media untuk memperkenalkan kembali aplikasi SILAMPAH kepada masyarakat, selain itu dibutuhkan penyusunan SOP untuk mendukung pengelolaan layanan SILAMPAH.

3. Masyarakat perlu lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang, Masyarakat perlu menyadari bahwa masalah sampah merupakan masalah bersama. Dampak dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah juga akan merugikan banyak orang. Oleh karena itu, dibutuhkan kesediaan masyarakat dalam mendukung setiap program lingkungan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Djopari, J. R. G. (2016). *Kebijakan Pemerintah*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Winarno, B. (2002). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- Rahmanto, Doni. 2020. *Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 di Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.